



## Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Kepercayaan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

**Jovan Alfredo Shaquille<sup>1</sup>, Alex Djan Serumi Kawer<sup>2</sup>,**  
**Muhammad Alvin Brilian Ankares<sup>3</sup>, Muhammad Rafi Tri Saputra<sup>4</sup>, Arina Romarina<sup>5</sup>**

1-5 Keuangan Publik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

E-mail : [shaquillejovan@gmail.com](mailto:shaquillejovan@gmail.com)<sup>1</sup>, [alexdjanserumikawer@gmail.com](mailto:alexdjanserumikawer@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[alvinakares1997@gmail.com](mailto:alvinakares1997@gmail.com)<sup>3</sup>, [rafi22mei@gmail.com](mailto:rafi22mei@gmail.com)<sup>4</sup>, [arina\\_romarina@ipdn.ac.id](mailto:arina_romarina@ipdn.ac.id)<sup>5</sup>

\* Penulis Korespondensi: [shaquillejovan@gmail.com](mailto:shaquillejovan@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** This study aims to analyze the influence of financial report quality on public trust in the Government of West Sumatra Province. The background of this research stems from the importance of transparency and accountability in regional financial management as the foundation for building public legitimacy toward government performance. This research employs a descriptive qualitative method using field studies through interviews and questionnaires distributed to 55 respondents consisting of citizens, academics, and regional government officials. The results show that the quality of financial reports has a positive relationship with public trust. Openness and information relevance emerge as the most influential factors contributing to the improvement of public confidence, while understandability remains a major challenge since financial reports are often considered too technical and difficult for non-accounting audiences to comprehend. These findings emphasize that the quality of financial reports depends not only on data accuracy but also on the government's ability to communicate information clearly and transparently. Therefore, local governments need to strengthen their public communication strategies, simplify the language of financial reports, and expand the presentation format of financial information to make it more accessible and understandable to the public. Such efforts are expected to enhance public trust and support the realization of good governance within the West Sumatra Provincial Government.

**Keywords:** Accountability; Financial Report Quality; Local Government; Public Trust; Transparency

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai dasar membangun legitimasi publik terhadap kinerja pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner kepada 55 responden yang terdiri dari masyarakat umum, akademisi, serta aparatur pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan memiliki hubungan positif dengan kepercayaan publik. Aspek keterbukaan dan relevansi informasi menjadi faktor dominan yang berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat, sedangkan aspek kemudahan dipahami masih menjadi kendala utama karena laporan keuangan dianggap terlalu teknis dan sulit dimengerti oleh kalangan non-akuntansi. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya bergantung pada akurasi data, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam menyajikan informasi secara komunikatif dan transparan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi komunikasi publik, menyederhanakan bahasa laporan, serta memperluas bentuk penyajian informasi keuangan agar lebih mudah diakses dan dipahami masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Sumatera Barat.

**Kata kunci:** Akuntabilitas; Kepercayaan Publik; Kualitas Laporan Keuangan; Pemerintah Daerah; Transparansi

## **1. LATAR BELAKANG**

Pengelolaan keuangan publik merupakan salah satu elemen vital dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah daerah sebagai entitas publik memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana masyarakat secara transparan, akuntabel, dan efisien. Melalui laporan keuangan, pemerintah memberikan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik serta menunjukkan sejauh mana kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan baik. Kualitas laporan keuangan menjadi salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik.

Dalam konteks otonomi daerah, setiap pemerintah provinsi dituntut untuk menyusun laporan keuangan yang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar tersebut menekankan pentingnya karakteristik laporan keuangan yang berkualitas, yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan disajikan tepat waktu. Laporan yang berkualitas tidak hanya berguna bagi proses pengambilan keputusan internal pemerintahan, tetapi juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menilai kinerja serta integritas aparatur publik.

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi fiskal, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah kini banyak ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu menyajikan informasi keuangan yang terbuka dan dapat dipercaya. Ketika laporan keuangan disusun secara akurat, lengkap, dan sesuai standar, masyarakat cenderung menilai pemerintah sebagai lembaga yang memiliki integritas tinggi. Sebaliknya, apabila laporan keuangan tidak transparan atau sering mendapat koreksi dari auditor, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat menurun karena dianggap menunjukkan lemahnya pengawasan dan manajemen keuangan daerah.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang terus berupaya memperkuat tata kelola keuangannya. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah provinsi ini memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangannya. Pencapaian tersebut menunjukkan peningkatan dalam sistem akuntansi dan pengendalian intern pemerintah daerah. Namun, capaian opini WTP belum sepenuhnya sejalan dengan persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan. Sebagian masyarakat masih menilai bahwa transparansi anggaran belum optimal, dan publikasi laporan keuangan belum sepenuhnya mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat umum. Kondisi ini menunjukkan adanya kemungkinan kesenjangan antara kualitas teknis laporan keuangan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Perkembangan teknologi informasi dan keterbukaan data publik melalui portal resmi pemerintah juga menjadikan masyarakat semakin aktif dalam memantau pengelolaan anggaran daerah. Ekspektasi publik terhadap akurasi dan transparansi laporan keuangan pun meningkat seiring dengan kemudahan akses informasi. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai media komunikasi yang memengaruhi hubungan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kepercayaan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana aspek relevansi, keandalan, keterpahaman, dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan berkontribusi terhadap pembentukan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk memperkuat transparansi keuangan publik di masa mendatang.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Kualitas laporan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam mencerminkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah terhadap publik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kualitas laporan keuangan ditentukan oleh empat karakteristik utama, yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan yang relevan berarti informasi yang disajikan mampu membantu pengguna dalam mengambil keputusan, baik untuk menilai kondisi keuangan masa lalu maupun memperkirakan keadaan di masa mendatang. Keandalan laporan keuangan menunjukkan sejauh mana informasi yang disampaikan bebas dari kesalahan material dan dapat dipercaya sebagai representasi yang jujur dari aktivitas ekonomi pemerintah.

Laporan keuangan yang baik juga harus disajikan secara jelas dan mudah dipahami agar masyarakat dapat mengakses dan menafsirkan informasi dengan benar. Karakteristik ini sangat penting karena laporan keuangan pemerintah tidak hanya digunakan oleh pihak internal, tetapi juga oleh publik yang berhak mengetahui bagaimana uang negara dikelola. Sementara itu, kemampuan laporan keuangan untuk dibandingkan memungkinkan masyarakat melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah dari waktu ke waktu. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis pencatatan, tetapi juga oleh cara penyajian dan keterbukaannya terhadap publik.

Kualitas laporan keuangan yang baik diyakini memiliki hubungan erat dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepercayaan publik pada dasarnya adalah keyakinan

masyarakat terhadap kejujuran, kompetensi, dan niat baik pemerintah dalam mengelola kepentingan umum. Mayer, Davis, dan Schoorman (1995) menjelaskan bahwa kepercayaan terbentuk melalui tiga dimensi utama, yaitu kemampuan, integritas, dan niat baik. Dalam konteks pemerintahan, kemampuan tercermin dari kapasitas pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara profesional dan transparan. Integritas berkaitan dengan konsistensi pemerintah dalam bertindak sesuai nilai moral dan etika publik, misalnya dengan menyajikan laporan keuangan yang bebas dari manipulasi. Sedangkan niat baik menggambarkan kepedulian pemerintah untuk memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.

Keterkaitan antara kualitas laporan keuangan dan kepercayaan publik dapat dipahami melalui logika transparansi dan akuntabilitas. Ketika laporan keuangan disusun secara relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan, masyarakat akan menilai bahwa pemerintah menjalankan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Hal ini meningkatkan persepsi positif terhadap kinerja pemerintah dan memperkuat kepercayaan publik. Sebaliknya, laporan keuangan yang tidak transparan, penuh koreksi, atau terlambat disampaikan dapat menimbulkan kecurigaan bahwa pemerintah tidak profesional atau bahkan menutupi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik.

Beberapa penelitian sebelumnya juga mendukung adanya pengaruh positif antara kualitas laporan keuangan dan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penelitian oleh Siahay (2023) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan publik merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa laporan keuangan yang disusun secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan mampu memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik.

Temuan serupa dikemukakan oleh Bintang, Sabrina, dan Samosir (2024) yang meneliti pengaruh pengungkapan informasi laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan publik pada lembaga pemerintahan. Penelitian tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat keterbukaan dan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Kedua penelitian ini memperlihatkan bahwa kualitas laporan keuangan bukan hanya sekedar alat pertanggungjawaban, tetapi juga sarana strategis untuk memperkuat hubungan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan berbagai teori dan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan bukan hanya sebatas kewajiban administrasi, tetapi juga merupakan sarana penting untuk membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

daerah. Dalam konteks Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, peningkatan kualitas laporan keuangan menjadi langkah strategis dalam memperkuat citra pemerintahan yang akuntabel dan transparan di mata publik.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik, khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi persepsi, pandangan, dan pengalaman masyarakat maupun aparatur pemerintah mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

Lokasi penelitian ditetapkan di Provinsi Sumatera Barat dengan pertimbangan bahwa daerah ini secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam beberapa tahun terakhir, namun masih terdapat dinamika dalam tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Fokus penelitian diarahkan pada lembaga-lembaga pemerintahan provinsi yang berperan langsung dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, serta masyarakat penerima layanan publik.

Data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, antara lain pejabat pemerintah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, auditor internal, serta perwakilan masyarakat atau tokoh publik yang memiliki perhatian terhadap transparansi keuangan daerah. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi lebih luas namun tetap sesuai dengan fokus penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi seperti laporan keuangan pemerintah provinsi, laporan hasil pemeriksaan BPK, publikasi dari situs resmi pemerintah daerah, serta jurnal atau literatur yang relevan. Data sekunder ini berfungsi sebagai bahan pembanding dan penguat analisis terhadap hasil wawancara.

Teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan hasil wawancara sesuai tema penelitian, yaitu kualitas laporan keuangan dan kepercayaan publik. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan hubungan antara

kualitas laporan keuangan dan persepsi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses interpretasi untuk menemukan pola hubungan dan makna yang relevan dengan tujuan penelitian.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi yang tersedia. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan kondisi yang objektif mengenai pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kepercayaan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar masyarakat menilai laporan keuangan pemerintah provinsi telah menunjukkan peningkatan dari sisi transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kepercayaan publik secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Dari hasil wawancara mendalam dengan aparatur pemerintah, akademisi, dan masyarakat umum, ditemukan bahwa persepsi publik terhadap laporan keuangan masih beragam. Sebagian besar informan mengapresiasi keterbukaan pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan secara daring melalui laman resmi pemerintah provinsi. Akan tetapi, beberapa masyarakat mengaku belum memahami isi laporan secara utuh karena bahasa yang digunakan masih bersifat teknis dan format penyajiannya sulit dipahami oleh mereka yang tidak memiliki latar belakang akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah memenuhi aspek formal transparansi, efektivitas penyampaian informasi masih perlu ditingkatkan agar pesan yang terkandung dalam laporan benar-benar tersampaikan kepada publik luas.

Untuk menggambarkan persepsi publik terhadap kualitas laporan keuangan, dilakukan survei terhadap 55 responden yang terdiri dari pegawai pemerintah daerah, dosen atau akademisi, mahasiswa, pelaku usaha, serta masyarakat umum. Survei ini dilakukan dengan menggunakan skala penilaian 1 sampai 5, di mana nilai 1 menunjukkan sangat buruk dan nilai 5 menunjukkan sangat baik. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.** Persepsi Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Skala 1–5)

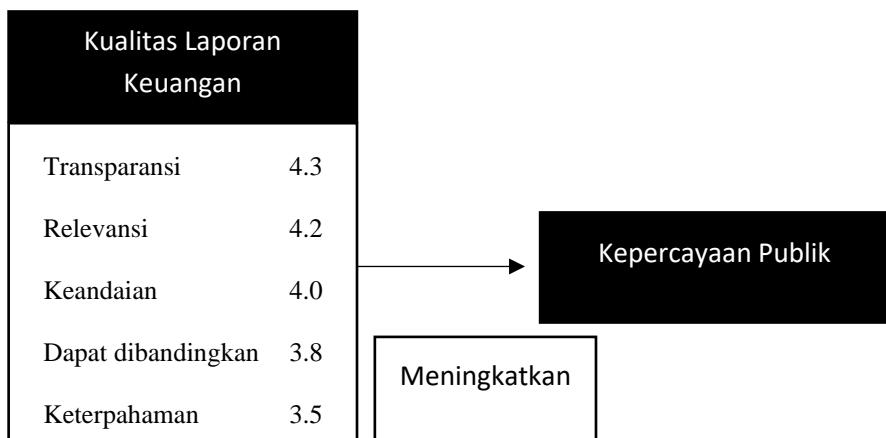
Aspek Kualitas Laporan Keuangan	Rata-rata Skor	Kategori
Relevansi informasi	4.2	Baik
Keandalan data keuangan	4	Baik
Kemudahan dipahami	3.5	Cukup
Dapat dibandingkan antarperiode	3.8	Baik
Keterbukaan dan akses publik	4.3	Sangat Baik

Dari tabel di atas terlihat bahwa keterbukaan dan akses publik memperoleh skor rata-rata tertinggi yaitu 4,3, yang menunjukkan bahwa masyarakat menilai pemerintah daerah cukup transparan dalam menyediakan akses terhadap laporan keuangan. Relevansi informasi juga mendapat penilaian tinggi dengan skor 4,2, menandakan bahwa isi laporan dianggap sesuai dengan kebutuhan publik untuk mengetahui arah penggunaan dana daerah. Namun demikian, aspek kemudahan dipahami masih menjadi titik lemah dengan skor 3,5, karena sebagian masyarakat merasa laporan disusun dengan istilah teknis dan format yang kurang ramah pembaca.

Temuan tersebut juga terlihat dalam wawancara dengan responden masyarakat umum, di mana beberapa menyebutkan bahwa laporan keuangan yang dipublikasikan masih lebih mudah dimengerti oleh pegawai pemerintah dibandingkan masyarakat biasa. Hal ini dapat menghambat efektivitas transparansi karena informasi yang sulit dipahami tidak mampu membangun kepercayaan publik secara optimal. Beberapa informan juga mengusulkan agar pemerintah menyusun ringkasan laporan keuangan dalam bentuk infografis atau laporan populer yang lebih sederhana sehingga masyarakat dapat lebih mudah menilai kinerja keuangan daerah.

Selain faktor penyajian, persepsi terhadap keandalan laporan keuangan juga berpengaruh pada tingkat kepercayaan publik. Dari hasil wawancara dengan aparatur BPKAD dan Inspektorat, diketahui bahwa pemerintah provinsi telah berupaya menjaga akurasi laporan dengan menerapkan sistem pencatatan berbasis akrual dan memperkuat pengawasan internal. Upaya tersebut berdampak positif terhadap penilaian masyarakat, terutama di kalangan akademisi dan pelaku usaha yang memahami pentingnya keandalan data keuangan. Namun demikian, kepercayaan masyarakat umum masih banyak dipengaruhi oleh pengalaman langsung terhadap pelayanan publik dan persepsi terhadap integritas aparatur pemerintah.

Hubungan antara kualitas laporan keuangan dan kepercayaan publik dapat digambarkan melalui diagram berikut.



**Gambar 1.** Diagram Hubungan antara Kualitas Laporan Keuangan dan Kepercayaan Publik

Diagram tersebut memperlihatkan bahwa semakin tinggi kualitas laporan keuangan dalam aspek transparansi dan relevansi, semakin besar pula tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Rata-rata skor kepercayaan publik berada pada angka 4,1, yang berarti tergolong tinggi, meskipun masih ada ruang perbaikan terutama dalam hal penyederhanaan laporan agar dapat menjangkau masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang beragam.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan memiliki peran strategis dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan temuan Siahay (2023) yang menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam memperkuat legitimasi pemerintah, serta penelitian Bintang, Sabrina, dan Samosir (2024) yang membuktikan bahwa keterbukaan informasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hasil ini menggambarkan bahwa pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan satu-satunya indikator keberhasilan, karena kepercayaan publik baru akan terbentuk apabila laporan keuangan tidak hanya disajikan dengan baik tetapi juga mudah diakses dan dipahami masyarakat luas.

Demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan hendaknya dibarengi dengan peningkatan strategi komunikasi publik. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan cara penyajian informasi agar lebih inklusif dan komunikatif, sehingga transparansi tidak berhenti pada keterbukaan data, melainkan juga pada keterpahaman publik. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat hubungan timbal balik antara pemerintah dan

masyarakat, serta menjadi pondasi bagi tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan terpercaya.

## **5 KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 55 responden di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh yang nyata terhadap tingkat kepercayaan publik. Secara umum, masyarakat menilai laporan keuangan pemerintah provinsi sudah menunjukkan kemajuan positif terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi. Upaya pemerintah daerah dalam mempublikasikan laporan keuangan melalui situs resmi dan kanal digital lainnya telah meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi keuangan daerah.

Namun demikian, peningkatan transparansi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isi laporan. Aspek kemudahan dipahami masih menjadi kendala utama, karena sebagian besar masyarakat menganggap bahasa dan format laporan keuangan masih terlalu teknis dan sulit diinterpretasikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi belum sepenuhnya efektif apabila tidak disertai dengan penyajian yang komunikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Dengan kata lain, kualitas laporan keuangan tidak hanya bergantung pada kelengkapan data dan akurasi penyajian, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengkomunikasikan isi laporan secara jelas dan transparan.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor keandalan dan relevansi laporan berperan penting dalam membangun kepercayaan publik. Masyarakat yang merasa laporan keuangan disusun dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan cenderung memiliki persepsi yang lebih positif terhadap integritas pemerintah. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara isi laporan dan realitas pelayanan publik dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, meskipun laporan tersebut telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintah. Dengan demikian, kepercayaan publik tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis pelaporan, tetapi juga oleh konsistensi pemerintah dalam menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi komunikasi publik agar laporan keuangan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga sarana membangun hubungan yang terbuka dengan masyarakat. Penyajian laporan dalam bentuk yang lebih sederhana, seperti infografis atau versi populer yang mudah dipahami, akan membantu masyarakat mengenali arah penggunaan anggaran serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap

hasil pembangunan daerah. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan media lokal juga penting untuk meningkatkan literasi keuangan publik, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi dan menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

Demikian, dapat ditegaskan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban formal, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik. Apabila pemerintah daerah mampu menjaga konsistensi dalam menyajikan laporan keuangan yang akurat, terbuka, dan mudah dipahami, maka kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah akan meningkat, yang pada akhirnya mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Sumatera Barat.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Anessi-Pessina, E., & Steccolini, I. (Eds.). (2020). *Financial management and accounting in the public sector*. Routledge.
- Arwati, R., & Latif, M. (2019). Public trust and financial transparency of e-government implementation in Bandung City. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*, 2(2), 81–92. <https://doi.org/10.33005/ebgc.v2i2.81>
- Bintang, L., Sabrina, D., & Samosir, R. (2024). The effect of disclosure of financial reporting information on the level of public trust in government institutions. *Income Journal: Accounting, Management and Economic Research*, 3(3), 73–85. <https://doi.org/10.61911/incomejournal.v3i3.73>
- Jannah, M., Haliah, H., & Nirwana, N. (2025). Transparency and accountability in local government financial reporting: A systematic literature review. *Social Sciences Insights Journal*, 3(1), 39-47. <https://doi.org/10.60036/mcdegf56>
- Loi, M. A., Pujiningsih, S., & Andayani, E. S. (2024). Transparency of financial reports of local government hospitals in Indonesia. *Oblik i finansi*, Issue 4, 150-158. [https://doi.org/10.33146/2307-9878-2024-4\(106\)-150-158](https://doi.org/10.33146/2307-9878-2024-4(106)-150-158)
- Mid et al. (2025). Human competencies: Amplifying financial reporting quality in Indonesian local government. *Journal of Risk & Financial Management*, 18(8), 424. <https://doi.org/10.3390/jrfm18080424>
- Nazaruddin, M., Rahmandani, Y., & Sibuea, A. (2023). Determinants of financial reporting local government organization transparency and accountability as a mediator. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis (JIAB)*, 18(2), 206–221.
- Saputri, D. R., Pujiningsih, S., & Utami, H. (2024). Determinants of transparency of local government financial reports in Indonesia. *Oblik i finansi*, 3(105), 120-131. [https://doi.org/10.33146/2307-9878-2024-3\(105\)-120-131](https://doi.org/10.33146/2307-9878-2024-3(105)-120-131)
- Shafritz, J. M., Russell, E. W., & Borick, C. P. (2016). *Financial management in the public*

*sector: Tools, applications, and cases (2nd ed.).* Routledge.

Siahay, M. (2023). Building public trust through transparency and accountability: A systematic review of the role of public sector accounting. *Jurnal Economic Resource*, 6(2), 1504–1515. <https://doi.org/10.57178/jer.v6i2.1504>

Smith, D. H. (2018). *Financial strategy for public managers*. Open Textbook Library.

Stiglitz, J. E. (2020). *Economics of the public sector (4th ed.)*. W. W. Norton & Company.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wang, X. (2014). *Financial management in the public sector (3rd ed.)*. Routledge.